

## ABSTRAK

**MARIYA AZIS**, No. NIM : 0037.02.48.2018. menyusun Tesis dengan judul “Implementasi Kepastian Hukum Dalam Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Oleh Pemerintah Kota Makassar” di bawah bimbingan **Dr. Hasan Kadir, SH.,MH.** dan **Dr. Dachran S Bustami, SH.,MH.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kepastian hukum dalam pemberian Izin Mendirikan Bangunan oleh Pemerintah Kota Makassar serta faktor – faktor yang mempengaruhi tidak terwujudnya kepastian hukum dalam pemberian Izin Mendirikan Bangunan oleh Pemerintah Kota Makassar.

Penelitian ini memadukan penelitian hukum normatif – empiris yaitu Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan analisis seluruh perangkat hukum yang terkait pemberian izin mendirikan bangunan serta mengumpulkan dan mengolah data primer yang diperoleh dilapangan. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, yang diperoleh menggunakan alat pengumpulan data berupa pedoman wawancara, dengan cara mewawancarai narasumber yang relevan dengan penelitian ini. Seluruh data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dan penyajian data secara deskriptif.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kepastian Hukum Dalam Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Oleh Pemerintah Kota Makassar telah terlaksana dan menjamin kepastian hukum berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan antara lain Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu. Untuk faktor – faktor yang mempengaruhi kurang terwujudnya Implementasi Kepastian Hukum Dalam Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Oleh Pemerintah Kota Makassar yaitu faktor kurangnya komunikasi anatara pihak DPM-PTSP dengan masyarakat dan kesadaran pengetahuan masyarakat yang masih kurang.

Rekomendasi penelitian ini : 1. Perlunya Pemerintah untuk membentuk satuan pengawasan dari SKPD terkait untuk dapat melakukan pengawasan dini pada persyaratan yang sering bermasalah, serta membuat regulasi untuk persyaratan memverifikasi keseluruhan berkas yang menjadi persyaratan pengajuan permohonan izin. 2. Agar kiranya masyarakat yang ingin

memohonakan izin, senantiasa memperhatikan dan berpedoman pada regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah.

## **ABSTRACT**

**MARIYA AZIS**, No. NIM: 0037.02.48.2018. compiled a Thesis with the title "Implementation of Legal Certainty in Granting Building Permits by Makassar City Government" under the guidance of **Dr. Hasan Kadir, SH., MH.** and **Dr. Dachran S Bustami, SH., MH.**

This study aims to determine and analyze the implementation of legal certainty in the granting of Building Permits by the Makassar City Government as well as the factors that influence the non-realization of legal certainty in the granting of Building Permits by the Makassar City Government.

This research combines normative - empirical legal research, namely legal research conducted by observing the analysis of all legal instruments related to granting building permits and collecting and processing primary data obtained in the field. This research was conducted at the Office of Investment and Integrated Services of One Door Makassar City. The data used are primary data and secondary data, obtained using data collection tools in the form of interview guidelines, by interviewing sources who are relevant to this research. All data collected was analyzed qualitatively and the data presentation descriptively.

The results of this study indicate that the implementation of legal certainty in granting permits to erect buildings by the Makassar City Government has been implemented and guaranteeing legal certainty based on legislation - invitations, among others, Mayor Regulation Number 27 Year 2017 Concerning One Stop Integrated Operation. For the factors that influence the less realization of the Legal Certainty in the Granting of Building Permits by the Makassar City Government, there is a lack of communication between DPM-PTSP parties with the public and lack of public awareness.

Recommendations for this research: 1. The need for the Government to form a supervisory unit from the relevant SKPD to be able to conduct early supervision on the requirements that are often problematic, and to make regulations for the requirements to verify the integrity of the files that are required to submit a permit application. 2. So that people who want to apply for a permit, always pay attention and refer to the regulations set by the Government.